

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Dorongan untuk membicarakan isu-isu humaniter (hak asasi manusia) telah sampai pada tingkatan negara. Keberadaan orang asing dalam perumusan kebijakan telah menjadi sebuah fenomena tersendiri dalam studi kebijakan publik. Orang luar memiliki hak absolut untuk dikonsultasikan tentang keputusan-keputusan yang mungkin merugikan mereka (Linklater, 2002). Kehadiran orang asing yang memasuki kedalam wilayah suatu negara mendapatkan jaminan haknya sebagai orang asing. Termasuk dalam hal ini adalah kehadiran pengungsi atau imigran.

Dewasa ini, isu pengungsi merupakan salah satu isu yang dibicarakan dalam ranah internasional. Rezim hukum internasional mengatur keberadaan pengungsi melalui Konvensi dan Protokol Pengungsi tahun 1951. Pada pasal ketiga dari konvensi ini memberikan keleluasan perlindungan bagi pengungsi untuk mendapatkan kesetaraan atau non diskriminasi, negara pihak akan menerapkan ketentuan-ketentuan konvensi ini pada para pengungsi tanpa diskriminasi ras, agama atau negara asal. Perlindungan pengungsi mencakup pengamanan dasar hak asasi manusia yang ditempatkan dalam situasi khusus, hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan orang, hak untuk terbebas dari penyiksaan dan perlakuan kejam atau merendahkan, tidak diskriminasi dan hak akses ke dasar-dasar yang diperlukan untuk bertahan hidup (makanan,

tempat tinggal, bantuan medis), dan jaminan masa depan mengenai swasembada (mata pencaharian, pendidikan, perawatan, kesehatan) (Feller, 2001: 583). Dalam kaitannya dengan sumber hukum internasional yang mengatur mengenai hak hak pengungsi adalah adanya prinsip *Non-Refoulement* dan *Non Ekstradisi* (Pasal 33). Substansi dari prinsip *non-refoulement* adalah jaminan suatu negara untuk tidak akan mengusir atau mengembalikan pengungsi dengan cara apapun ke negara asalnya dimana kehidupan dan kebebasannya akan terancam (Wagiman, 2012). Jadi, para pengungsi yang datang ke suatu negara, akan mendapatkan haknya dengan tidak akan dikembalikan atau ditolak untuk memasuki wilayah negara tersebut. Namun, apa yang terjadi di Amerika Serikat tidak menunjukkan hal tersebut.

Amerika Serikat merupakan sebuah negara demokrasi, dimana hal tersebut merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Amerika Serikat. Mengutip dari situs resmi Pemerintah Amerika Serikat¹, “Demokrasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM) telah menjadi komponen dasar dari kebijakan luar negeri Amerika Serikat”. Demokrasi merupakan instrumen penting dalam kaitannya dengan HAM, “Pentingnya demokrasi sebagai cara untuk mempromosikan penghormatan terhadap hak asasi manusia terletak pada kenyataan bahwa ia menawarkan janji untuk menyediakan panduan strategis jangka pendek untuk para reformis dan pembuat kebijakan” (Mesquita, Downs, Smith, & Cherif, 2005: 439). “Ketika sistem demokrasi

¹ <https://www.state.gov/j/drl/democ/>

ada, pada umumnya bahwa kesediaan dan kapasitas otoritas untuk melanggar hak asasi manusia akan berkurang” (Davenport & Armstrong, 2004: 538). Termasuk didalamnya adalah hak bagi para imigran yang mencari suaka ke negara lain. Rezim perlindungan pengungsi, dimana *United Nations High Commissioner for Refugees* melepaskan fungsi mandatnya, berawal dari prinsip-prinsip umum mengenai hak asasi manusia (Feller, 2001: 582).

Selain Amerika Serikat sebagai negara demokrasi yang menghormati HAM, Amerika Serikat juga merupakan salah satu negara yang menandatangani dan telah meratifikasi Konvensi dan Protokol Mengenai Status Pengungsi 1951 dan 1967 (UNHCR, 1967). Dengan hal ini maka akan memberikan implikasi pada kebijakan nasional nantinya. Sebuah keoptimisan akan harapan ratifikasi atau aksesinya oleh suatu negara memberikan sinyal kesediaan yang dipandu oleh sebuah ‘prinsip’ dokumen dan berharap bahwa mekanisme pemantauan dokumen ini akan mempromosikan implementasi hak-hak ini ke dalam kebijakan nasional (Camp, 1999: 95).

Amerika Serikat juga dikenal sebagai negara yang terbuka. Dalam tatanan sosial masyarakatnya, Amerika Serikat merupakan negara yang terdiri dari berbagai macam latar belakang budaya dan tempat asal yang bersifat terbuka atau dikenal dengan istilah *melting pot*. Istilah ini mengacu pada masyarakat yang heterogen menjadi lebih homogen dengan berbagai elemen “melebur bersama’ menjadi kesatuan yang harmonis (Crossman, 2019). Catatan dari Biro Sensus Amerika Serikat, terdapat 13,5% dari total seluruh warga

Amerika Serikat merupakan *foreign born*² per tahun 2018. Keberagaman nilai dan kebudayaan yang dimiliki oleh masing-masing latar belakang menyebabkan pada adanya pertemuan diantaranya dalam suatu ruang, dalam kehidupan Amerika Serikat. Mereka dapat hidup bersama dalam suatu ruang Amerika Serikat meskipun memiliki latar belakang yang berbeda.

Namun, menjadi ironi bagi Amerika Serikat, pada masa kepemimpinan Presiden Donald Trump mengeluarkan sebuah kebijakan yang kontroversial, yaitu *Protecting the Nation From Foreign Terrorist Entry Into the United States* (US Government, 2017). “Kebijakan Amerika Serikat ini bertujuan untuk melindungi warganya dari serangan teroris, termasuk yang dilakukan oleh warga negara asing” (US Government, 2017). Kebijakan ini merupakan perwujudan dari adanya sikap proteksi yang dilakukan oleh Pemerintah Amerika Serikat berdasarkan pengalaman kemasyarakatannya mengenai isu terorisme yang terjadi.

Isu mengenai perintah eksekutif Donald Trump *Protecting the Nation From Foreign Terrorist Entry Into the United States* merupakan hal yang menarik untuk diteliti, khususnya dari sudut pandang individu. Sebagai individu yang memiliki peran sebagai presiden, menarik untuk diteliti dalam kaitannya karakteristik personal yang dimiliki olehnya dan kaitannya dengan kebijakannya. Telah ada penelitian yang membahas mengenai perintah eksekutif Donald Trump dalam sudut pandang individu, oleh Haridimos

² *Foreign Born* merupakan istilah yang merujuk pada orang yang tidak memiliki kewarganegaraan Amerika Serikat pada saat lahir. Populasi ini termasuk warga negara yang dinaturalisasi, penduduk tetap yang sah, pengungsi dan pencari suaka, dan orang-orang dengan visa sementara tertentu (Migration Policy Institute, 2020).

Tsoukas (2018) dengan judul *Leadership, the American Academic of Management, and President Trump's Travel Ban: A Case Study of Moral Imagination*. Penelitian tersebut menekankan pada pertentangan moralitas yang dipegang dari suatu kebiasaan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kebijakan suatu negara dan kaitan faktor kepemimpinan dari pemegang pimpinan suatu negara, dengan memperhatikan karakteristik individu menggunakan konsep yang telah dirumuskan oleh Margaret Hermann (1980) dalam jurnalnya dengan judul *Explaining Foreign Policy Behavior Using the Personal Characteristics of Political Leaders*.

1.2. Rumusan Masalah

Inti dari rumusan masalah penelitian ini adalah mengenai “Bagaimana Karakteristik Personal Presiden Donald Trump dalam mengambil kebijakan *Protecting the Nation From Foreign Terrorist Entry Into the United States* ?”

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan khusus yang dijelaskan sebagai berikut.

1.3.1. Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan karakteristik individu atau pemimpin negara kaitannya dengan kebijakan suatu negara.

1.3.2. Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah mendeskripsikan, menganalisis dan menyimpulkan karakteristik personal atau sifat dari Presiden Donald Trump serta implikasinya pada kebijakannya.

1.4. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh manfaat sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi dunia pendidikan, khususnya ilmu Hubungan Internasional. Hal ini akan memberikan suatu pendekatan yang lain mengenai studi kebijakan sebuah negara yang ditinjau dari karakteristik personal pengambil keputusan atau Presiden.

1.4.2. Manfaat Praktis

Peneliti berharap dapat memberikan gambaran mengenai karakteristik personal Presiden Donald Trump yang digunakan dalam memahami kebijakan Amerika Serikat pada periode kepemimpinannya.

1.5. Kerangka Pemikiran

Fokus dari penelitian ini terletak pada level individu karakteristik personal Presiden Donald Trump sebagai pengambil keputusan. Dalam menganalisis kebijakan luar negeri, pertama kami perlu memahami mengenai individu, dan sikap penilaian, keputusan dan perilaku (Erisen, 2012). Secara garis besar

penelitian ini membahas karakteristik personal dari Presiden Donald Trump yang kemudian mempengaruhi tindakannya kebijakannya.

Margaret G. Hermann menyatakan bahwa ada 6 karakteristik personal individu yang mempengaruhi orientasi kebijakan luar negeri. *These characteristics, each of individual interest, interrelate to form two orientations to foreign affairs, and the influence of these orientations on foreign policy behavior is also explored* (Hermann M. G., 1980: 7). Enam karakteristik tersebut meliputi *nationalism, beliefs in one's own ability to control events, need for power, need for affiliation, conceptual complexity, dan distrust of other*. Berikut adalah penjelasannya.

1.5.1. Nationalism

Nationalism atau nasionalisme adalah cara pandang mengenai dunia dimana negara sendiri memegang panggung utama; ikatan emosional yang kuat dengan negara sendiri melalui penekanan kehormatan dan identitas nasional (Hermann M. G., 1980: 20). Nasionalisme juga dapat dipahami sebagai sebuah gagasan moral pembenaran tindakan untuk melindungi hak bangsa terhadap yang lainnya (Barrington, 1997: 713). Karakteristik ini dapat diketahui melalui frasa yang mengacu pada bangsanya sendiri dengan istilah yang menguntungkan dan yang menunjukkan kekuatan atau frasa yang mengenai pentingnya kehormatan atau identitas nasional (Hermann M. G., 1980: 20).

1.5.2. Beliefs in One's Own Ability to Control Events

Beliefs in One's Own Ability to Control Events atau kepercayaan diri mengenai kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap peristiwa atau isu. Hal ini dapat dipahami sebagai sebuah pandangan mengenai dunia dimana para pemimpin mempersepsikan beberapa tingkat kendali dimana persepsi bahwa individu dan Pemerintah dapat mempengaruhi apa yang terjadi (Post, 2010: 202). Kemampuan ini erat kaitannya dengan kemampuan seseorang untuk mempersepsikan tingkat kontrol atas situasi yang terlibat, pemerintah dapat mempengaruhi apa yang terjadi didalam atau pada bangsa (Hermann M. G., 1980: 20). Hal ini kemudian dipahami sebagai sebuah kemampuan kontrol individu tentang situasi yang sedang terjadi.

Dalam tahapan operasionalisasinya, dapat diidentifikasi dengan sikap menerima tanggung jawab untuk memulai atau merencanakan tindakan (Hermann M. G., 1980: 20). Untuk memberikan definisi operasional, peneliti mengambil kode yang telah diberikan oleh Jerold Post (2010). Kategori tinggi memiliki ciri bahwa para pemimpin mengambil tanggung jawab untuk merencanakan atau memulai suatu tindakan, mereka percaya bahwa mereka memiliki kendali atas apa yang terjadi. Pemimpin yang percaya bahwa mereka dapat mempengaruhi apa yang terjadi cenderung untuk memulai dan mengawasi kegiatan untuk memastikan bahwa kebijakan diberlakukan, mereka cenderung mengambil

alih karena mereka merasa mereka dapat mempengaruhi peristiwa (Post, 2010: 202).

Sedangkan pemimpin dengan kategori rendah dalam keyakinan bahwa mereka dapat mengendalikan apa yang terjadi cenderung lebih reaktif terhadap situasi, menunggu untuk melihat bagaimana situasi cenderung bermain sebelum bertindak (Post, 2010: 202).

1.5.3. Need For Power

Need for power atau kebutuhan kekuatan pengaruh adalah kebutuhan untuk memberikan pengaruh atau dampak pada orang lain. Hal ini erat hubungannya dengan “membangun, mempertahankan, atau memulihkan kekuatan seseorang, misalnya dampak kontrol atau pengaruh seseorang terhadap orang lain (Winter, 1973: 250). Dalam situasi nyatanya, peneliti mengambil kodefisikasi yang telah dikemukakan oleh Winter (1957), yaitu: tidak menyukai orang yang memegang posisi kekuasaan besar, dan terus-menerus menantang mereka, memusuhi seseorang dengan status tinggi, dan memenuhi orang-orang dari pengakuan rendah dan status.

1.5.4. Need For Affiliation

Need for affiliation atau kebutuhan akan afiliasi adalah berhubungan dengan “membangun, mempertahankan, atau memulihkan hubungan yang hangat dan ramah” dengan orang atau kelompok lain (Atkinson, 1958: 685). McClelland (1987) mendefinisikan motivasi afiliasi sebagai upaya membangun, memulihkan atau mempertahankan

hubungan yang akrab, hangat, dan bersahabat dengan orang lain, atau secara emosional prihatin atas perpisahan dari orang lain (Schmidt & Frieze, 1997: 426). Karakteristiknya dapat dilihat melalui perasaan hangat, positif, ramah terhadap orang atau bangsa lain. Kodefikasi afiliasi dapat dilihat dari kegiatan pendampingan dengan ramah (Post, 2010: 168).

1.5.5. Conceptual Complexity

Conceptual Complexity atau kompleksitas konseptual merupakan tingkatan diferensiasi yang ditunjukkan seseorang dalam menggambarkan dan mendiskusikan orang lain, menempatkan kebijakan, ide, atau hal lain (Hermann M. G., 1980, hal. 20). Kategori ini memberikan manifestasi karakteristik personal yang dimiliki sebagai sebuah pandangan yang diaktualisasikan kedalam cara mengidentifikasi atau melabeli orang atau kelompok lain. Interpretasi dan konsistensi merupakan kunci dari perilaku (Post, 2010, hal. 210).

Terdapat kategori tinggi dan rendah dalam kompleksitas konseptual. Karakteristik personal individu dengan kompleksitas konseptual yang tinggi memiliki pandangan yang cenderung abu-abu daripada memberikan klasifikasi hitam atau putih dan mencari berbagai perspektif yang lain (Post, 2010, hal. 209). Pemimpin dengan karakteristik ini akan cenderung memberikan *statement* atau pernyataan yang berbeda dalam memandang suatu objek isu atau kelompok. Sedangkan untuk kategori rendah, individu ini mampu untuk memberikan pernyataan dengan konsistensi hitam atau putih dalam sebuah klausul isu.

1.5.6. Distrust of Other

Distrust of Other atau ketidakpercayaan terhadap orang lain adalah perasaan ragu ragu dan gelisah tentang orang lain, kecenderungan untuk mencurigai dan meragukan motif dan tindakan orang lain (Hermann M. G., 1980: 21). Selain itu, ketidakpercayaan juga dapat dipahami sebagai sebuah kepercayaan tentang suatu hubungan mengenai perilaku pasangan yang tidak diinginkan, berasal dari pengetahuan tentang kemampuan individu dan niat (Lewicki, Mcallister, & Bies, 1998: 439). *Distrust of other* juga dikaitkan dengan perang disposisi dalam kebijakan luar negeri (Post, 2010: 45). Dengan demikian, kesimpulan yang didapat adalah pemimpin dengan karakteristik personal ini tidak dapat dengan mudah untuk mempercayai sesuatu.

Setelah diuraikan ciri dari masing-masing karakteristik individu, peneliti bermaksud untuk menyampaikan penyederhanaan uraian pengertian diatas dalam bentuk tabel pada halaman selanjutnya. Tabel ini telah dirumuskan dan dituliskan sebelumnya oleh Margaret Hermann (1980).

Tabel 1.1
Karakteristik Personal, Konseptualisasi, dan Operasionalisasi

<i>Personal Characteristic</i>	<i>Conceptualization</i>	<i>Operationalization</i>
Nationalism	View of the world in which one's own nation holds center stage; strong emotional ties to one's own nation with emphasis on national honor and national identity.	Focus on nouns/noun phrases referring to nation; coded nationalism if noun refers to own nation and is modified by favorable term, term denoting strength, or phrase suggesting importance of national honor or identity; coded nationalism if noun refers to another nation and is modified by hostile term, term denoting weakness or phrase suggesting meddling/interference in affairs of others.
Beliefs in One's Own Ability to Control Events	View of the world in which individual perceives some degree of control over situations involved in; government can influence what happens in or to nation	Focus on verb (action words); coded for this characteristic if context of verb indicated speaker (or group speaker identifies with) accepting responsibility for initiating or planning the action.
Need For Power	Concern with "establishing, maintaining, or restoring one's power, i.e., one's impact, control, or influence over others" (Winter, 1973, p.250).	Focus on verbs; coded need power if verb context met any six conditions indicated in Winter's (1973) need power coding schemas
Need For Affiliation	Concern with "establishing, maintaining, or restoring warm, and friendly relationship" with other person or groups (Atkinson, 1958, p. 685)	Focus on verbs; coded need affiliation if verb context met any of four conditions indicated in Atkinson's (1958) need affiliation coding schema.
Conceptual Complexity	Degree of differentiation person shows in describing or discussing other people, places policies, ideas, or thing.	Looked in context for set of high complexity words (e.g., may, possibly, sometimes, tends) and set of low complexity words (e.g., always, only, without a doubt).
Distrust of Other	General feeling of doubt, uneasiness, and misgiving about others; an inclination to suspect and doubt the motives and actions of others.	Focus on nouns/noun phrases referring to groups; speaker does not identify with; coded for distrust if context showed indications of doubts or misgivings or suggested group going to harm speaker or group with which speaker identifies.

Sumber : Hermann, M. G. (1980). Explaining Foreign Policy Behaviour Using The Personal Characteristics of Political Leaders. *International Studies Quarterly*, 7-46

Dari enam karakteristik personal individu tersebut, akan merujuk pada dua orientasi personal kebijakan yang dibuat yaitu *Aggressive Leader* dan *Conciliatory Leader* (Hermann M. G., 1980). Pada setiap orientasi personal kebijakan memiliki ciri-cirinya. *Aggressive Leader* atau pemimpin yang agresif memiliki ciri sedikit kemampuan untuk mempertimbangkan berbagai alternatif, kecurigaan terhadap motif orang lain, minat yang tinggi dalam menjaga identitas dan kedaulatan nasional, dan kemauan yang berbeda untuk memulai tindakan. Para pemimpin seperti itu akan berusaha untuk mempertahankan individualitas bangsa mereka agar terhindar dari kerugian. Hermann (1980) telah memberikan pendapatnya mengenai tipe pemimpin ini dalam kutipannya sebagai berikut.

Kepala pemerintahan dengan orientasi ini cenderung ingin bertindak sendiri dan memulai perilaku dengan cara mereka sendiri. Mereka akan berusaha mempertahankan otonomi, yaitu mengendalikan perilaku nasional mereka sendiri. Pemimpin semacam ini percaya bahwa mereka dapat memiliki efek pada peristiwa. Apalagi mereka tidak mempercayai pemimpin negara lain. Kedua sifat ini ditambah dengan keinginan untuk mempertahankan posisi dan kekuatan negara mereka sendiri dan basis mereka menunjukkan penekanan pada independensi tindakan (Hermann M. G., 1980: 31)

Sedangkan untuk *Conciliatory Leader* atau pemimpin konsiliatoris memiliki ciri menunjukkan perlunya membangun dan memelihara hubungan yang bersahabat dengan orang lain, kemampuan untuk mempertimbangkan berbagai alternatif, sedikit kecurigaan terhadap motif orang lain, tidak ada perhatian utama dengan pemeliharaan identitas dan kedaulatan nasional, dan sedikit minat memulai tindakan. Mereka lebih menyukai untuk memperoleh

manfaat dari bekerja sama daripada melawan orang lain. Membangun pada tingkat kepercayaan yang tinggi pula (Hermann M. G., 1980).

Kesimpulan yang didapatkan adalah *Aggressive leader* memiliki ciri [1] tinggi dalam nasionalisme, [2] tinggi dalam kepercayaan pada kemampuan sendiri untuk mengendalikan peristiwa, [3] tinggi dalam kebutuhannya dalam *power*, [4] rendah dalam kompleksitas konseptual, dan [5] tinggi dalam ketidakpercayaannya terhadap orang lain. Sedangkan untuk *conciliatory leader* memiliki ciri [1] rendah dalam nasionalisme, [2] rendah dalam kepercayaan pada kemampuan sendiri untuk mengendalikan peristiwa, [3] tinggi dalam kebutuhan afiliasi, [4] tinggi dalam kompleksitas konseptual, [5] rendah dalam ketidakpercayaan terhadap orang lain.

Setelah diuraikan semua kerangka pemikiran yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitiannya, maka akan didapatkan alur berfikir. Pada tahap yang pertama, peneliti akan mencari, menganalisis dan menentukan identifikasi karakteristik individu. Hal tersebut akan dijadikan sebagai acuan kedalam tahap kedua, yaitu tipe orientasi kebijakan. Setelah kedua tahap telah selesai dilakukan, maka akan didapatkannya sebuah kesimpulan akhir penelitian ini. Untuk menyederhanakannya, akan dijelaskan melalui bagan alur berfikir yang tertera setelah paragraf ini. Hal ini digunakan dalam rangka memudahkan peneliti untuk menjawab rumusan masalah dan memudahkan pembaca dalam rangka memahami isi dari penelitian yang dilakukan.

Bagan 1.1. Alur Pemikiran dalam Analisis Rumusan Masalah



Sumber : Diolah oleh penulis.

1.6.Hipotesis

Peneliti berpendapat bahwa Donald Trump merupakan salah satu pemimpin dengan ciri *aggresive leader*; tinggi dalam nasionalisme, kepercayaan tinggi pada kemampuan sendiri untuk mengendalikan peristiwa, tinggi kebutuhannya dalam *power*, rendah dalam kompleksitas konseptual, dan ketidakpercayaannya yang tinggi terhadap orang lain. Hal tersebut memberikan implikasi pada kecurigaan terhadap motif orang lain, minat yang tinggi dalam menjaga kepentingan nasional, dan kemauan tanggungjawab untuk memulai suatu tindakan, yang kemudian ditunjukkannya pada kebijakan; *Protecting the Nation From Foreign Terrorist Entry Into the United States*.

1.7.Metode Penelitian

Dalam sub bab metode penelitian ini berisikan mengenai cara-cara yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitiannya. Sub bab ini juga akan memberikan mengenai gambaran tentang bagaimana desain penelitian yang dilakukan.

1.7.1. Definisi Konseptual

Definisi konseptual merupakan sebuah batasan konsep yang digunakan oleh peneliti dalam rangka melakukan penelitiannya. Hal ini dimaksudkan agar arah penelitian dapat terlihat dengan jelas serta menghasilkan sebuah analisis yang mendalam tanpa adanya ambiguitas definisi konsep.

1.7.1.1.Karakteristik Personal

Karakteristik personal diartikan sebagai sebuah sikap penilaian terhadap sesuatu, keputusan dan perilakunya. Karakteristik personal memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya. Karakteristik personal juga akan membentuk dua orientasi kepribadian individu dalam kepemimpinannya, yaitu *Aggressive Leader* dan *Conciliatory Leader* .

1.7.1.2.Nationalism

Nationalism atau nasionalisme dipahami sebagai sebuah sikap yang dimiliki oleh seorang pemimpin atau kepala negara dalam cara pandanginya tentang dunia dimana menempatkan nasionalitas dari negara atau bangsanya sebagai tujuan utamanya. Dalam penelitian ini juga dapat dipahami sebagai sebuah ikatan emosional antara individu seorang pemimpin terhadap bangsa dan negaranya dengan penekanan pada kehormatan dan identitas nasional.

1.7.1.3. *Beliefs in One's Own Ability to Control Events*

Beliefs in one's own ability to control events atau kepercayaan diri mengenai kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap peristiwa sebagai suatu kemampuan seseorang atau pemimpin dalam mempersepsikan tingkat kontrol terhadap suatu peristiwa yang sedang terjadi. Dapat dipahami juga sebagai sebuah kemampuan kontrol kendali atas sebuah isu yang sedang dihadapi oleh pemerintahannya.

1.7.1.4. *Need for Power*

Need for Power atau kebutuhan kekuatan pengaruh adalah sebuah kemampuan seseorang dalam rangka memberikan pengaruh terhadap suatu isu atau orang lain serta kelompok. Hal ini akan erat kaitannya mengenai usaha untuk membangun, memulihkan pengaruh dengan dampak yang ingin diciptakan oleh seorang pemimpin melalui tindakan yang dilakukannya.

1.7.1.5. *Need for Affiliation*

Penelitian ini memberikan batasan definisi konseptual terhadap *need for affiliation* atau kebutuhan akan afiliasi, dengan memahaminya sebagai sebuah upaya untuk meningkatkan hubungan yang akrab terhadap orang atau kelompok lain.

1.7.1.6. *Conceptual Complexity*

Conceptual Complexity atau kompleksitas konseptual merupakan tingkatan diferensiasi yang ditunjukkan seseorang dalam menggambarkan

dan mendiskusikan orang lain, menempatkan kebijakan, ide, atau hal lain (Hermann M. G., 1980, hal. 20). Kategori ini memberikan manifestasi karakteristik personal yang dimiliki sebagai sebuah pandangan yang diaktualisasikan kedalam cara mengidentifikasi atau melabeli orang atau kelompok lain. Interpretasi dan konsistensi merupakan kunci dari perilaku

1.7.1.7. *Distrust of Other*

Distrust of other atau ketidakpercayaan terhadap orang lain adalah sebuah sikap atau rasa yang dimiliki oleh seorang pemimpin dalam mempersepsikan keraguan dan kegelisahan serta mencurigai terhadap motif orang lain.

1.7.1.8. *Orientasi Kebijakan*

Orientasi kebijakan adalah keputusan yang dibuat oleh pemimpin atau kepala negara hasil dari pengaruh dari sikap penilaian individu terhadap sesuatu, keputusan dan perilakunya.

1.7.2. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan sebuah operasionalisasi dari konsep yang telah dicantumkan pada sub bab sebelumnya. Maka, pada sub bab ini menerangkan mengenai operasionalisasi konsep yang digunakan dalam penelitian.

1.7.2.1. *Karakteristik Personal*

Operasionalisasi konsep dari karakteristik personal dapat dilihat melalui ucapan, tindakan dan sikap keputusannya terhadap suatu isu yang dihadapi olehnya.

1.7.2.2. *Nationalism*

Operasionalisasi konsep *nationalism* atau nasionalisme dapat dilihat melalui penggunaan frasa atau kalimat yang menggambarkan yang menunjukkan adanya superioritas yang lebih unggul mengenai bangsa atau negaranya sendiri diatas entitas yang lainnya. Hal ini juga dapat dilihat melalui istilah yang menguntungkan dan yang menunjukkan pentingnya kehormatan atau identitas nasional.

1.7.2.3. *Beliefs in One's Own Ability to Control Events*

Operasionalisasi konsep dari *beliefs in one's own ability to control events* atau kepercayaan diri mengenai kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap peristiwa adalah terletak pada tindakan yang diambil oleh pemimpin dalam menghadapi sebuah peristiwa yang terjadi. Pada pemimpin dengan tingkat kepercayaan diri yang tinggi akan mengambil tanggung jawab untuk merencanakan atau memulai suatu tindakan. Pemimpin yang percaya bahwa mereka dapat mempengaruhi apa yang terjadi di dunia dapat dilihat dari ketertarikannya dan keaktifannya yang cukup aktif dalam proses pembuatan kebijakan dan mereka akan mengambil alihnya. Sedangkan untuk kategori rendah dapat dilihat pada adanya kompromi dengan menunggu dan melihat bagaimana situasi

berjalan dengan cenderung untuk menerima masukan dari beberapa pihak sebelum memulai tindakannya.

1.7.2.4. *Need for Power*

Kategori seseorang yang memiliki sikap *need for power* atau kebutuhan kekuatan pengaruh terletak pada sikap yang cenderung untuk memusuhi seseorang yang mempunyai status tinggi, rasa tidak suka terhadap seseorang atau kelompok lain yang mempunyai kekuatan yang lebih besar dengan cara menyerang mereka secara verbal.

1.7.2.5. *Need for Affiliation*

Terdapat dua hal yang mengindikasikan karakteristik konsep *need for affiliation* yaitu adanya tindakan dan juga perkataan yang disampaikan oleh pemimpin tersebut. Operasionalisasi konsepnya dapat dilihat melalui ungkapan perasaan yang hangat, intim, bersahabat, positif dan ramah. Hal ini dapat terlihat melalui ikatan emosional yang mendalam yang dimiliki oleh seorang pemimpin terhadap orang lain atau entitas negara lain melalui sikap yang positif serta upaya membangun persahabatan.

1.7.2.6. *Conceptual Complexity*

Dalam tahap operasionalisasinya, terdapat kategori tinggi dan rendah dalam kompleksitas konseptual. Karakteristik personal individu dengan kompleksitas konseptual yang tinggi memiliki pandangan yang cenderung abu-abu daripada memberikan klasifikasi hitam atau putih dan mencari berbagai perspektif yang lain (Post, 2010, hal. 209). Pemimpin

dengan karakteristik ini akan cenderung memberikan *statement* atau pernyataan yang berbeda dalam memandang suatu objek isu atau kelompok. Sedangkan untuk kategori rendah, individu ini mampu untuk memberikan pernyataan dengan konsistensi hitam atau putih dalam suatu klausul isu.

1.7.2.7. *Distrust of Other*

Operasionalisasi *distrust of other* atau ketidakpercayaan terhadap orang lain adalah dapat dilihat melalui perasaan curiga dan tidak percaya mengenai motif atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok lain. Hal ini dapat dilihat melalui perkataan dan perbuatan pemimpin tersebut yang cenderung untuk memberikan tanggapan yang negatif.

1.7.2.8. *Orientasi Kebijakan*

Operasionalisasi orientasi kebijakan adalah hasil keputusan yang dibuat oleh pemimpin atau kepala negara yang dipengaruhi oleh sikap penilaian individu terhadap sesuatu, keputusan dan perilakunya.

1.7.3. Tipe Penelitian

Penelitian ini memiliki tipe eksplanatif, bagaimana suatu sebab akan menghasilkan sebuah akibat. Sebab yang diambil sebagai variabel penelitian adalah karakteristik individu dan variabel akibat adalah kebijakannya.

1.7.4. Jangkauan Penelitian

Penelitian ini berfokus pada karakteristik individu yang dimiliki oleh Presiden Donald Trump, yaitu pada perilaku, sikap, penilaian, dan perkataan dalam kerangka Kebijakan *Protecting the Nation From Foreign Terrorist Entry Into the United States*. Penelitian ini tidak membahas mengenai faktor pembentuk dari perilaku individu Donald Trump.

1.7.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Studi pustaka dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data sekunder yang diambil dari buku-buku, jurnal, majalah, koran, dan artikel-artikel online yang memiliki kredibilitas dan validitas data yang baik.

1.7.6. Teknik Analisis Data

Dalam melakukan analisis data, peneliti menggunakan metode *content analysis*. Metode ini dapat dipahami sebagai sebuah usaha untuk mendapatkan sebuah kesimpulan secara objektif melalui karakteristik pesan (individu) yang ditentukan (Stemler, 2001). Metode ini dipilih untuk menginterpretasi makna komunikasi baik verbal maupun non verbal.

1.7.7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari 4 bab. Bab 1 merupakan bagian pendahuluan mengenai kerangka penelitian. Pada bab 2 dituliskan mengenai Donald Trump, deskripsi, latar belakang kebijakan serta dampaknya secara singkat. Bab 3 membahas mengenai analisis

karakteristik personal yang dimiliki oleh Donald Trump dalam kebijakannya. Analisis dituliskan menggunakan konsep-konsep yang telah diuraikan pada bagian kerangka pemikiran dan diperkuat dengan data terkait. Sedangkan bab 4, merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dan saran terhadap penelitian lebih lanjut.

